

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Anding Nugraha, I Gede Mandra dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra (2016) yang meneliti tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya *Tax Amnesty* Periode Pertama Pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI”. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data triwulan II dan triwulan III tahun 2016 pada 43 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Dengan menggunakan variabel *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Assets Turn Over*, dan *Return On Equity*, serta menggunakan alat analisis uji *paired sample t-test*. Dari penelitian ini, menunjukkan bahwa CR (*Current Ratio*) dan DER (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih baik dari standar industri. Sedangkan TATO (*Total Assets Turn Over*) dan ROE (*Return On Equity*) lebih baik dari standar industri. Terdapat perbedaan yang signifikan antara CR, TATO dan ROE pada sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama, sedangkan pada DER tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada sebelum dan sesudah diberlakukan *tax amnesty* periode pertama.

Danang Bayu Irawanto dan Tri Yuniati (2016) yang meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk”. Data yang digunakan adalah neraca dan laba rugi periode 3

tahun sebelum dan 3 tahun sesudah akuisisi. Dengan menggunakan variabel *Current Ratio*, *Debt to Total Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin*, *Return on Asset*, *Cash Ratio*, *Return on Equity*, dan menggunakan alat analisis uji *paired sample t-test*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa dari 7 rasio yang diuji, 5 diantaranya yakni *Current Ratio*, *Debt to Total Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin*, dan *Return on Asset*, dalam periode 3 tahun sebelum dan sesudah akuisisi mempunyai perbedaan yang signifikan. Sedangkan 2 lainnya *Cash Ratio*, dan *Return on Equity* tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebelum dan sesudah akuisisi.

Abraham Muchlish dan Dwi Umardani (2016) yang meneliti tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, LDR/FDR, REO/BOPO antara bank syariah dengan bank konvensional periode 2005 sampai 2012. Dengan menggunakan variabel CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, LDR/FDR, REO/BOPO dan menggunakan alat analisis uji *paired simple t-test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional, yakni pada rasio keuangan CAR, ROA, ROE, LDR / FDR, and BOPO. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio NPL and NPF.

Nurbayatillah Khatami, Raden Rustam dan Sri Sulasmiyati (2017) yang meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan sebelum dan sesudah *Initial Public Offering* pada perusahaan non finansial yang listing ditahun 2011 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan menggunakan variabel *Current Ratio* (CR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Debt Ratio* (DR), *Total Assets Turnover Ratio* (TATO), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE), serta menggunakan alat analisis uji *paired simple t-test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah IPO dilihat dari nilai mean antara CR dan ROE. Sedangkan jika dilihat dari nilai *mean* DER, DR, TATO, NPM, dan ROI, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan IPO. Dilihat secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan tidak mengalami peningkatan sesudah melakukan IPO dikarenakan periode pengamatan yang singkat dan juga kondisi perusahaan yang masih dalam tahap penyesuaian sesudah melakukan IPO.

Fauzan Nur Abdillah (2017) yang meneliti tentang “*Tax Amnesty* dan Perbankan Indonesia (Studi Komparatif terhadap Kesehatan Bank *Gateway* dan Non *Gateway*)”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kinerja dari 38 bank pada periode semester II tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2017. Dengan menggunakan variabel Rasio Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum (KPMM), rasio *Return Of Assets* (ROA), rasio *Net Interest Margin* (NIM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan rasio *Non Performing Loan* (NPL), serta dengan menggunakan alat analisis uji *paired* dan *independent sample t-test*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan positif terhadap rasio KPMM dan NIM saja untuk kedua kategori bank, sedangkan untuk rasio NPL bank *gateway* terdapat perbedaan negatif yang berarti bahwa saat program pengampunan pajak, terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah.

Gus Efrianto (2017) yang meneliti tentang “Analisis Perbandingan Likuiditas Bank Persepsi Sebelum dan Sesudah Diberlakukan Amnesti Pajak”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank persepsi yang berjumlah 18 bank yang terdaftar secara berturut-turut pada periode I sampai III yaitu pada bulan September 2016 sampai Maret 2017. Dengan menggunakan variabel *Cash Ratio*, *Loan to Asset Ratio*, *Quick Ratio*, *Investing Policy Ratio*, *Banking Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio* sebelum dan sesudah amnesti pajak, serta menggunakan alat analisis uji *paired t-test*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel-variabel likuiditas memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum amnesti pajak maupun sesudah amnesti pajak pada periode I hingga periode III. Terdapat dua variabel likuiditas yang memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah amnesti pajak, yaitu pada variabel *Loan to Asset Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio*. Sedangkan pada variabel likuiditas lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan akibat adanya amnesti pajak.

Shelly Saraswati, Dikdik, dan Azib (2017) yang meneliti tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Atas Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 bank yang menerima dana *tax amnesty*. Dengan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga, *Return On Assets*, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional dan *Loan to Deposit Ratio*. Dengan menggunakan alat analisis uji *paired t-test* dan uji *wilcoxon*. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan DPK, ROA dan kenaikan LDR atau penyaluran kredit dan mengalami penurunan Biaya operasional yang diukur dengan perbedaan signifikansi terjadi sesudah penerapan *tax amnesty*. DPK naik sebesar 1.14 persen sesudah *tax amnesty*. ROA naik sebesar 34,7 persen, LDR 4,17 persen untuk BOPO mengalami penurunan sebesar 5,11 persen.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Analisis Kinerja Keuangan**

#### **a. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklarifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2007 : 2). Umumnya

laporan keuangan tersebut cenderung disajikan dalam bentuk per triwulan atau per semester bahkan per tahun, tergantung dari perusahaan tersebut.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan (Dwi Prasetyo dan Rifka Julianty, 2002 : 5).

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Hal ini dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dan memanfaatkan tambahan sumber daya. Sedangkan informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut. Dan dari informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak berkepentingan dan akan mempengaruhi nilai pada perusahaan.

#### b. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Utomo (2012 : 59) analisis kinerja keuangan perusahaan didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan pada laporan

keuangan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja keuangan bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Kinerja keuangan berguna untuk menilai kondisi keuangan bank, sedangkan teknik analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan yang sering digunakan adalah rasio keuangan. Kondisi keuangan dapat dicerminkan dari tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank yang bersangkutan.

c. Analisis Rasio Keuangan

Faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja keuangan perusahaan adalah faktor fundamental perusahaan, dimana untuk menganalisis faktor fundamental suatu perusahaan digunakan analisis

rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan dalam memastikan kondisi emiten dalam keadaan bagus atau dalam keadaan tidak bagus. Rasio-rasio yang sering digunakan untuk menganalisis kinerja suatu bank adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Menurut Fitri Dian (2009 : 12) tiga jenis rasio yang sering digunakan oleh bank :

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek maksimal satu tahun dengan sejumlah aktiva lancar yang dimiliki (Muhammad Faisal, 2002 : 40). Likuiditas sebagai rasio menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek penting diketahui karena berkaitan dengan kemampuannya dalam membayar hutang jangka panjang. Perusahaan yang tidak mampu membayar hutang jangka pendek pada umumnya juga tidak mampu membayar hutang jangka panjang. Meskipun perusahaan mampu memperoleh laba, namun apabila perusahaan tidak dapat membayar hutangnya maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek dapat diketahui dengan memahami sifat dari masing-masing unsur aktiva lancar. Hal ini disebabkan hutang

jangka pendek perusahaan akan dibayar dengan aktiva lancarnya (Munawir, 2002 : 227).

Diketahui likuiditas perusahaan perbankan syariah dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan diwakili dengan indikator *Financing Debt Ratio* (FDR).

## 2) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang (Martono, 2002 : 83). Perusahaan dikatakan *solvable* apabila memiliki aktiva yang cukup untuk membayar hutang jangka panjang. Sementara perusahaan yang tidak memiliki aktiva yang cukup untuk membayar hutang jangka panjang disebut sebagai perusahaan yang *unsolvable*.

Solvabilitas bank berhubungan dengan laba yang dilaporkan sebagai hasil dari proses akuntansi dasar. Meskipun laba yang dilaporkan tidak sama dengan kas yang tersedia untuk jangka pendek, namun biaya dan pendapatan merupakan transaksi yang bermuara pada kas (Munawir, 2002 : 20). Dan dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang digunakan diwakili dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

### 3) Rasio Rentabilitas

Menurut Kasmir (2007 : 274) rentabilitas (*earning*) merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya dalam setiap periode untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio rentabilitas mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional bank. Bank dengan perolehan laba yang cukup dapat membagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Dan dalam penelitian ini rasio rentabilitas yang digunakan diwakili dengan indikator *Return On Assets* (ROA).

## 2. *Tax Amnesty* (Amnesti Pajak)

### a. Latar Belakang *Tax Amnesty*

Latar belakang *tax amnesty* dari diberlakukan kepada para wajib pajak diantaranya adalah (1) terdapat harta milik warga negara baik didalam maupun diluar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, (2) untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak, dan (3) kasus *Panama Pappers* yang melibatkan sejumlah pengusaha Indonesia melakukan penanaman modal pada perusahaan gelap yang sengaja didirikan di

wilayah-wilayah surga bebas pajak (Formasi Lembaga Manajemen *SmartTaxes Publishing*, 2016:7).

Berdasarkan ketiga latar belakang *tax amnesty* tersebut, maka presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku hingga tanggal 31 Maret 2017 dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu Periode I: dari tanggal 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016, Periode II: dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, Periode III: dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

b. Pengertian Tax Amnesty

Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendefinisikan arti pengampunan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Menurut Stella (1991 : 383) mendefinisikan bahwa *tax amnesty* merupakan periode temporer pembayaran sukarela yang diikuti dengan pengakuan penghindaran pajak dengan pengurangan denda. *Tax amnesty* merupakan sebuah alat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan yang cepat dan besar, meningkatkan investasi dalam negeri, dan menggiatkan kembali usaha-usaha yang vakum hanya dalam beberapa bulan saja.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* merupakan sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam periode terbatas dengan potensi jumlah yang sangat besar apabila berhasil dilakukan. Disisi lain bank domestik akan mengalami kenaikan likuiditas akibat adanya arus dana yang masuk dari luar negeri berupa dana repatriasi. Untuk menerima dana repatriasi tentunya Pemerintah harus bekerja sama dengan perbankan sebagai alat untuk administrasi dan pengawasan dana repatriasi yang telah diinvestasikan oleh wajib pajak ke dalam negeri. Bank yang ikut mendaftarkan diri sebagai pintu masuk dana repatriasi disebut dengan bank persepsi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.119/PMK.08/2016.

Mengenai dana yang dialihkan dan ditempatkan pada rekening khusus sebagaimana yang dimaksud sebelumnya yaitu dapat diinvestasikan pada instrumen investasi. Investasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk : SBN Republik Indonesia, obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, investasi keuangan pada bank persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawali oleh Otoritas Jasa Keuangan, investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi keuangan melalui bank ditempatkan pada beberapa instrumen, yakni efek bersifat utang, sukuk, saham, unit penyertaan reksadana, aset beragun aset, unit penyertaan dan investasi *real estate*, deposito, tabungan, giro, dan instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dan penempatan pada instrumen investasi tersebut dilakukan hanya pada bank persepsi selaku *gateway* program *tax amnesty* sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 119/PMK. 08/ 2016.

c. Bank Persepsi

Menurut kamus Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bank Umum Negara atau BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan dan penerimaan bukan pajak. Fungsi bank persepsi sebagai *gateway* dalam kebijakan *tax amnesty* ini adalah menerima dana repatriasi dengan memfasilitasi pembukaan rekening khusus bagi wajib pajak, mengadministrasikan, dan mengawasi agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Keuntungan yang didapat sebagai bank *gateway* adalah mengetahui informasi jalur-jalur investasi yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk dapat membuka produk investasi keuangan bagi

perusahaan bank, sehingga manajer bank dapat menghitung risiko dan peluang dengan cermat.

### 3. Bank Umum Syariah

Bank merupakan lembaga yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian. Bagi suatu negara keberadaan bank selain untuk menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, bank juga sebagai salah satu perangkat untuk membantu suatu negara dalam perkembangan ekonomi. Sehingga perkembangan ekonomi perbankan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, maka bank dalam hal ini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena dampaknya mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.

Bank syariah merupakan bagian dari perbankan di Indonesia. Pengertian bank syariah atau bank Islam menurut Edy Wibowo (2005 : 33) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah memiliki tata cara beroperasi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah

bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dengan pembayaran.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Seperti pada firman Allah surat An Nisa' ayat 29 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Terjemahan oleh Muhammad Taufiq).

### C. Hipotesis

#### 1. *Financing Deposit Ratio* (FDR)

Raiso likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Financing Deposit Ratio*. FDR merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pinjaman yang diberikan atau didanai oleh pihak ketiga. FDR dihitung dengan perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total dana masyarakat dan total modal sendiri yang digunakan. Besarnya FDR perbankan syariah di Indonesia mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, bank dianggap sehat apabila

besarnya FDR antara 85persen sampai dengan 110persen (Maharani Ika dan Toto Sugiharto, 2013 : 196).

*Financing Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai likuiditasnya, atau dengan kata lain, seberapa jauh pembiayaan pada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya. Apabila rasio tersebut semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin besar pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan dengan menunjukkan bahwa bank mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan bank dengan baik (Suyatmin, 2006 : 140).

Dalam penelitian ini rasio FDR dibandingkan menggunakan adanya kebijakan *tax amnesty* yang berlangsung pada Juli 2016 sampai dengan Maret 2017 di Indonesia. Kebijakan *tax amnesty* memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia termasuk pada sektor perbankan. Pasalnya kewenangan wajib pajak dalam bentuk repatriasi dan investasi harta, maka dapat menjadi peluang alternatif dengan harapan dapat meningkatkan likuiditas sehingga dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan dan uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan saham juga akan dapat meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Nur Abdillah (2017) menyatakan bahwa hasil uji LDR tidak ada perbedaan antara periode

sebelum *tax amnesty* dan saat *tax amnesty* pada bank *gateway* maupun *non gateway*. Namun pada perbandingan rasio likuiditas dengan indikator FDR pada Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah antara sebelum, selama dan sesudah *tax amnesty* belum ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan pengujian terhadap perbedaan rasio FDR antara sebelum, selama dan sesudah *tax amnesty* Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi bank persepsi *tax amnesty* yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

a. Sebelum – Selama

$H_1$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

$H_2$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

$H_3$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

b. Sebelum – Sesudah

H<sub>4</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>5</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>6</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

c. Selama – Sesudah

H<sub>7</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>8</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>9</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

2. *Capital Adequency Ratio* (CAR)

Peranan modal sangat penting karena selain digunakan untuk kepentingan ekspansi, juga digunakan sebagai *buffer* untuk menyerap

kerugian kegiatan usaha. Dalam hal ini bank wajib memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku untuk peningkatan modal (SEBI No 6/73/Intern DPNP 2004).

Secara teknis, analisis tentang permodalan disebut juga sebagai analisis solvabilitas, atau disebut juga *capital adequacy analysis*, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah permodalan bank yang ada telah mencukupi untuk mendukung kegiatan bank yang dilakukan secara efisien, apakah permodalan bank tersebut akan mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, dan apakah kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) akan semakin besar atau semakin kecil (Teguh Pudjo, 1999: 3). Modal adalah salah satu faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam menilai keamanan kesehatan bank. Modal dasar yang memadai berfungsi sebagai jaringan pengaman untuk berbagai risiko yang dihadapi sebuah institusi dalam menjalankan usahanya. Modal menyerap potensi kerugian dan dengan demikian menyediakan dasar untuk menjaga kepercayaan nasabah pada bank.

Pada penelitian ini rasio CAR juga diperbandingkan menggunakan peristiwa kebijakan *tax manesty* yang terjadi di Indonesia yang berlangsung Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Melalui *tax amnesty* atas Wajib Pajak yang memiliki kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menimbulkan banyaknya dana segar yang masuk ke dalam sistem

ekonomi Indonesia. Masuknya sebagian dana tersebut ke dalam perekonomian nasional akan menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam bentuk obligasi dan saham yang dapat meningkatkan permodalan pada perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anding Nugraha, I Gede Mandara dan I Nyoman Nugraha Ardana Putra(2016) untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara *Cash Ratio* (CR) sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari t-hitung sebesar 3,8persen lebih kecil dari 5persen.

Perbandingan rasio solvabilitas dengan indikator CAR pada Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi yakni PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah antara sebelum, selama, dan sesudah *tax amnesty* belum ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan pengujian terhadap perbedaan rasio CAR antara sebelum, selama dan sesudah *tax amnesty* Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi bank persepsi *tax amnesty* yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

a. Sebelum – Selama

$H_{10}$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

$H_{11}$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

$H_{12}$ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

b. Sebelum – Sesudah

$H_{13}$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

$H_{14}$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

$H_{15}$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

c. Selama – Sesudah

H<sub>16</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>17</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>18</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

3. *Return On Equity* (ROE)

Perbankan dengan prinsip syariah memperoleh keuntungan dari prinsip bagi hasil, margin keuntungan, dan sebagainya (Kasmir, 2006 :14). Karakter perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional yakni memiliki standar moral Islami dan dengan dewan pengawas tersendiri, membuat penyaluran dana bank syariah cenderung pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan.

Pada penelitian ini rasio ROE juga diperbandingkan menggunakan peristiwa kebijakan *tax amnesty* yang terjadi di Indonesia yang berlangsung Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Melalui *tax amnesty* atas wajib pajak yang memiliki kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan

menimbulkan banyaknya dana segar yang masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia. Masuknya sebagian dana tersebut ke dalam perekonomian nasional akan menjadi energi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan pada perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erlita (2010) untuk menganalisis pengaruh reformasi pajak badan tahun 2008 terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, NPM, dan ROE pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROE pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak 2008.

Perbandingan rasio rentabilitas dengan indikator ROE pada Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi yakni PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah antara sebelum dan sesudah *tax amnesty* masih belum ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan pengujian terhadap perbedaan rasio ROE antara sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi bank persepsi *tax amnesty*. Dari uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

a. Sebelum – Selama

H<sub>19</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>20</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>21</sub>: Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

b. Sebelum – Sesudah

H<sub>22</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>23</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>24</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

c. Selama – Sesudah

H<sub>25</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>26</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>27</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Permatasari, dkk (2015), risiko kredit dapat ditunjukkan dengan besaran *Non Performing Financing* (NPF). Semakin rendah rasio ini maka kemungkinan bank mengalami kerugian sangat rendah yang secara otomatis laba akan semakin meningkat. *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang akan mempengaruhi faktor-faktor makroekonomi nasional dan melibatkan seluruh institusi keuangan dan investasi yang ada sehingga akan menimbulkan risiko maupun peluang bagi perbankan secara keseluruhan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Damayanthi (2013), faktor *risk profile* pada bank kecil dan bank besar menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan bank besar memiliki

peringkat profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank kecil dengan menggunakan rasio NPF pada variabel penelitian.

Pada penelitian ini rasio NPF juga diperbandingkan menggunakan peristiwa kebijakan *tax amnesty* yang terjadi di Indonesia yang berlangsung Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Melalui *tax amnesty* atas wajib pajak yang memiliki kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan menimbulkan banyaknya dana segar yang masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia. Masuknya sebagian dana tersebut ke dalam perekonomian nasional akan mempengaruhi faktor-faktor makroekonomi nasional dan melibatkan seluruh institusi keuangan dan investasi yang ada sehingga akan menimbulkan risiko maupun peluang bagi perbankan secara keseluruhan.

Perbandingan rasio likuiditas dengan indikator NPF pada Bank Umum Syariah yang menjadi bank persepsi yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah antara sebelum, selama, dan sesudah *tax amnesty* belum ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan pengujian terhadap perbedaan rasio NPF antara sebelum, selama dan sesudah *tax amnesty* Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi bank persepsi *tax amnesty* yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank

Muamalat Indonesia, dan PT BNI Syariah. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

a. Sebelum – Selama

H<sub>28</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>29</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>30</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan selama *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

b. Sebelum – Sesudah

H<sub>31</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>32</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>33</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

c. Selama – Sesudah

H<sub>34</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.

H<sub>35</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>36</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF selama dan sesudah *tax amnesty* BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.

Berdasarkan hipotesis yang sudah dijelaskan maka dapat digambarkan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Hipotesis**

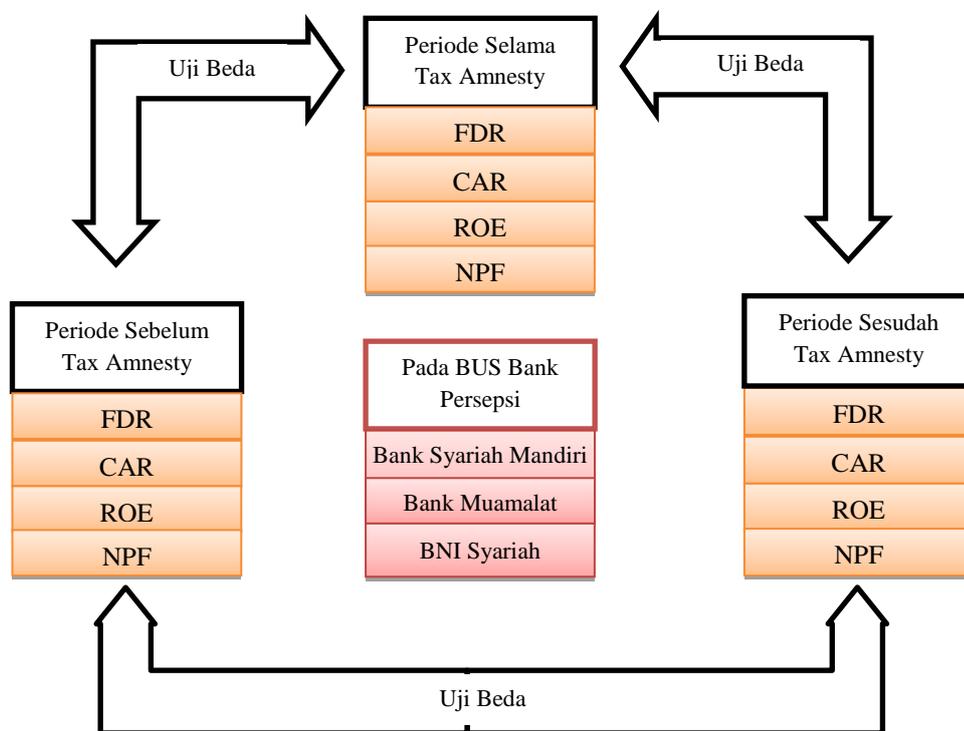
No	Keterangan
1	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.
2	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia.
3	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah.
4	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
5	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
6	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
7	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
8	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
9	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
10	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
11	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia

12	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
13	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
14	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
15	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
16	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
17	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
18	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio CAR selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
19	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
20	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
21	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
22	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri.
23	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
24	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
25	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri

26	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
27	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
28	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
29	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
30	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan selama <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
31	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
32	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
33	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah
34	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri
35	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT Bank Muamalat Indonesia
36	Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF selama dan sesudah <i>tax amnesty</i> BUS yang menjadi bank persepsi pada PT BNI Syariah

#### D. Model Penelitian

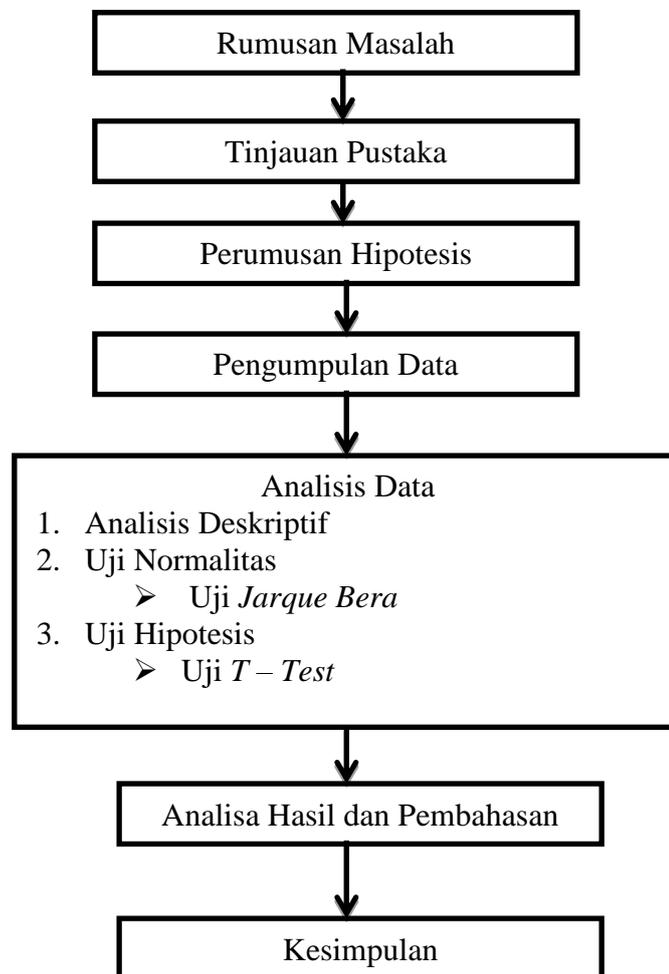
Berdasarkan uraian pada landasan teori, peneliti dapat menggambarkan kerangka konseptual perbandingan kinerja keuangan sebelum, selama, dan sesudah *tax amnesty* pada Bank Umum Syariah sebagai bank persepsi yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Muamalat Indonesia, PT BNI Syariah , sebagai berikut :



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

### E. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.3 Alur Penelitian**